

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO**

Oleh:
Veronica Rantung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: veronicarantung@gmail.com

ABSTRAK

Perwujudan *good government* masyarakat di setiap daerah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dari sektor publik agar masyarakat dapat mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Paradigma tersebut pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya tapi harus diimbangi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat. APBD merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak semua daerah berhasil memfungsikan APBD secara tepat. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan dengan baik atau tidak (sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data historis dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Manado, belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak disajikannya Laporan Pencatatan Keuangan dan arus kas.

Katakunci : analisis, pencatatan, pelaporan.

ABSTRACT

The embodiment of good government in every area of public demands for transparency and openness so that people can control and improve local government performance. The paradigm of government giving autonomy but must be balanced with proper management of the area. Budget is a strategic agenda in improving the welfare of society. Not all areas were functioning. The research objective was to determine whether the city transportation department manado has done well or not recording (according to PP No. 24 of 2005 on financial management) and to know the constraints faced in doing the recording and reporting of financial. The analytical method used is descriptive analysis method to classify the way and collect the form of financial statement manado city transportation agencies. Using secondary data sources manado city transportation department has yet to fully implement financial management in accordance with Permendagri No. 13 in 2006 government accounting standards. Because not presents notes to the financial statements and cash flow.

Keywords : analysis, record, report.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*Good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menanggapi paradigma baru maka pemerintah memberikan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar mampu berdaya guna dan berhasil guna untuk penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan tanggung jawab. (Darise, 2009).

Dalam sistem Pemerintahan Daerah terdapat dua sub sistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. (Nordiawan, 2007) Awalnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kota Manado sendiri masalah yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi sehingga kinerja dari SKPD masih perlu dievaluasi (beritamanado.com). Informasi lain menyebutkan bahwa keterlambatan data aset yang masuk di Pemerintah Propinsi mengalami keterlambatan sehingga dalam proses pelaporan ke BPK juga ikut mengalami keterlambatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Terus berupaya menciptakan akuntabilitas keuangan agar mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajib Tertib Administrasi (WTA), serta akuntabilitas kinerja yang terdapat diupayakan agar masuk ke kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 yang diaudit tahun 2012 menghasilkan opini adverse, yaitu berada satu tingkat lebih tinggi dari hasil audit tahun 2010 yang diaudit tahun 2011 yang menghasilkan disclaimer opini.

Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintahan kota Manado sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Dari uraian di atas permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Manado khususnya di Dinas Perhubungan Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Manado
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Manado dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditentukan secara rutin dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Sistem juga merupakan sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan atau tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Selain itu sistem merupakan suatu hal yang ritmis, berulang kali terjadi, atau langkah-langkah terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian jika akuntansi bertujuan membuat laporan keuangan maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut (Mulyadi, 2001).

Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. (Fees dan Warren 1990, dikutip oleh Halim 2010). Sedangkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejalan dengan sistem administrasi keuangan organisasi pemerintah.

Era reformasi ini telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan Negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Koreksi pertama dengan menyatukan anggaran Negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni: anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam masa orde baru, anggaran rutin dikontrol oleh Kementerian atau Departemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan struktur pembelanjanya maupun alokasinya dikendalikan oleh Bappenas. (Mahmudi, 2011).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PP Nomor 17 Tahun 2003 Bab III APBN menyatakan APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
3. Fungsi pengawasan

4. Fungsi lokasi
5. Fungsi distribusi

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah mengungkapk andu a jenis Satuan Kerjanya yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. (Santoso, 2007). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 dapat dijelaskan dengan rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi
2. Jurnal
3. Posting ke buku besar
4. Neraca saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Neraca saldo setelah penyesuaian
7. Laporan keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Catatan atas laporan keuangan
 - d. Arus Kas
8. Jurnal penutup

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian berjenis komparatif mengenai analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satu kerja perangkat daerah (SKPD) di dinas perhubungan kotamanado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado yang beralamat di jalan Cereme. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomis jurusan akuntansi.

Prosedur Penelitian

- Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
 2. Merumuskan permasalahan yang jelas serta menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
 3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan data mengenai analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satu kerja perangkat daerah (SKPD) di dinas perhubungan kotamanado.
 4. Menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada dinas perhubungan.
 5. Membuat kesimpulan dan saran bagi dinas perhubungan.

Metode Penelitian

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Untuk itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan.

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan penelitian digunakan dengan 3 cara, yaitu:

1. Wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan dinas perhubungan kota Manado.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.
3. Pengamatan/observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian (Kuncoro, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh dinas perhubungan kota Manado selama Tahun Anggaran bersangkutan. Transaksi penerimaan kas yang akan digunakan untuk kegiatan dinas perhubungan kota Manado selama Tahun Anggaran bersangkutan.

Belanja

Belanja terbagi dari dua jenis:

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri.
- b. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

Jurnal

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada benda harta pengeluaran, maka PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)
2. Akuntansi Aset

Posting Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, langkah selanjutnya PPK-BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing. Posting dilakukan secara periodik. Untuk Dinas Perhubungan Kota Manado tidak membuat buku besar sesuai rekening masing-masing, hanya membuat Buku Kas Umum untuk semua transaksi.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya.

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca Saldo dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (worksheet), dan dari kertas kerja tersebutlah PPK-BKD menyusun Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK-Dinas Perhubungan Kota Manado terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

1. Laporan Realisasi Anggaran Kas

Berdasarkan hasil data penelitian, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan tahun anggaran 2011 berupapendapatan dan belanja.

Total realisasi pendapatan untuk tahun 2011 adalah Rp 3.318.631.825 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 76,80% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp 4.321.254.783.

Total realisasi belanja selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp 11.941.387.837 ini menunjukkan telah terjadi realisasi anggaran sebesar 90,66% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp 13.172.048.617. Nilai itu terdiri dari:

- Belanja Operasional Rp 9.186.112.029 (96,71%)
- Belanja Barang dan Jasa Rp 2.302.645.058 (74,64%)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 452.630.750 (76,93%)

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian, Neraca Dinas Perhubungan Kota Manado Tahun anggaran 2011 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Manado sebesar Rp 28.735.297.125 yang terdiri dari aset lancar Rp 19.112.000, aset tetap 28.671.185.125 dan aset lainnya Rp 45.000.000. Kewajiban yang dimiliki adalah sebesar Rp 548.781.750 yang lainnya terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 548.781.750. Sedangkan Ekuitas Dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 28.186.515.375.

Pembahasan

Pencatatan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Manado belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, hal ini berdasarkan karakteristik kualitatif di PP Nomor 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Perhubungan tidak lengkap (tidak ada catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas). Tapi informasi yang disajikan tepat waktu, memiliki *feedback value* (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki manfaat prediktif (memprediksikan masalah yang akan datang).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Perhubungan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya koordinasi dengan PEMKOT Manado tentang format laporan keuangan yang digunakan, sehingga menimbulkan beberapa kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, seringkali keterlambatan pengumpulan dokumen-dokumen/nota dari setiap bidang dan kurangnya perhatian terhadap peraturan-peraturan pemerintah daerah yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Tabel 1. Rangkuman Pembahasan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005	Dinas Perhubungan Kota Manado
1. Dilihat dari tujuan, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai: a. aset b. Kewajiban c. ekuitas dan dana d. pendapatan e. belanja f. transfer g. arus kas	Penediaan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh dinas perhubungan telah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005
2. Komponen-komponen laporan keuangan sebagai berikut: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Laporan arus kas d. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan yang disediakan oleh dinas perhubungan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah, karena dinas perhubungan tidak menyediakan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
3. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: a. Pendapatan daerah b. Dana perimbangan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Dari segi pendapatan, dinas perhubungan telah sesuai dengan peraturan pemerintah
4. Belanja dikelompokkan: a. Belanja tidak langsung b. Belanja langsung	Dari segi belanja, dinas perhubungan telah sesuai dengan peraturan pemerintah

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Manado

PENUTUP

Kesimpulan

Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan PP No. 24 Tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan), karena belum menerapkan secara keseluruhan konsep laporan keuangan, yaitu tidak adanya catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Dan tidak menyajikan akumulasi penyusutan untuk belanja modal pada neraca. Akibatnya penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, bisa dilihat di aktivasi tetapi yang sudah hampir habis masapaknya sudah tidak layak lagi digunakan masih disajikan sebesar nilai perolehan. Serta terdapatnya beberapa kendala dalam proses pencatatan laporan keuangan seperti, seperti kurangnya koordinasi dengan pemerintah kota Manado tentang format laporan keuangan yang digunakan, sehingga menimbulkan beberapa kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, seringnya terlambat pengumpulan dokumen/nota dari setiap bidang dan kurangnya perhatian terhadap peraturan pemerintah daerah yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Saran

Sebaiknya untuk tahun anggaran 2012 dan seterusnya, Dinas Perhubungan Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman sepenuhnya pada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Serta perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dan kemampuan khususny dalam proses akuntansi (pencatatan dan pelaporan).

DAFTAR PUSTAKA

- BeritaManado.2013.ManadoOptimisMasukWilayahBebasKorupsi.Manado.
<http://beritamanado.com/manado/pemkot-manado-optimis-masuk-wilayah-bebas-korupsi/>
tanggalakses09Februari2013
- Darise,Nurlan.2009. *PengelolaanKeuanganDaerah* .Edisikedua.PT.Indeks.Jakarta.
- Halim,Abdul.2010. *SistemAkuntansiSektorPublik* .STIMYKPN.Yogyakarta.
- Kuncoro,Mudrajat.2009. *MetodeRisetUntukBisnisdanEkonomi* .Erlangga.Jakarta.
- Mahmudi.2011. *AkuntansiSektorPublik* .SalembaEmpat.Yogyakarta
- Mardiasmo.2004. *AkuntansiSektorPublik* .ANDI.Yogyakarta.
- Mulyadi.2001. *SistemInformasiAkuntansi* .SalembaEmpat.Jakarta.
- Nordiawan.2007. *AkuntansiPemerintahan* .SalembaEmpat.Jakarta.
- Republik Indonesia. PERMENDAGRINo.13 Tahun2006tentang, *PedomanPengelolaanKeuanganDaerah* . Jakarta.
- _____.PPNo.24Tahun2005tentang, *StandartAkuntansiPemerintahan* .Jakarta.
- _____.PPNo.8Tahun2006tentang, *LaporanKeuangan&KinerjaInstansiPemerintah* .Jakarta.
- _____.UUNo.22Tahun1999tentang *PemerintahDaerah*. Jakarta.
- _____.UU No.33 Tahun 2004 tentang, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.Jakarta
- _____.PPNo.58Tahun2005tentang, *PengelolaanKeuanganDaerah* .Jakarta.
- _____.UUNo.17Tahun2003tentang, *KeuanganNegara* .Jakarta.
- Santoso.2007. *AkuntansiKeuanganMenengah* .RefikaAditama.Bandung.